

# PENANAMAN NILAI KEPAHLAWANAN DALAM PENDIDIKAN DENGAN MEMANFAATKAN DATA SEJARAH

*Moh. Rosyid\**

**Abstract:** Timescales experienced by founding fathers in establishing and enforcing the country from the clutches of invaders if not immediately be documented is feared to be forgotten its heroism spirit by that current and future generations. Heroism will be remembered by the present and future generations if understood the heroic story. Embedding heroism can be imperishable when teachers of history provide a fun and dynamic method of learning. The dynamics of teaching is something that should receive extra attention without which learning process will be boring. A practical solution, teacher should be experts in the field of study not just anybody. This may eliminate the impression that learning history is merely memorizing events and forgetting the incident analysis. Embedding heroism in education can utilize historical data. It is expected to develop a sense of nationalism and nationhood, rectifying historical data, memorizing national heroes who are sometimes forgotten by the hustle of life, and historical data can be used as authentic evidence before the tribunal. Scattered historical data still needs to be explored by promoting historical source criticism to avoid victimization history in the next generation. It is to be anticipated as historical data may be used as weapons strengthen the regime in power, even it can be used as bullets to kill political rivals.

**Kata Kunci:** Data, Sejarah, Pembelajaran, dan Nasionalisme

---

\* Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Jl.Conge, Ngembalrejo No.51 Kudus, e-mail:

## PENDAHULUAN

Pasca-Orde Baru, masyarakat kita mendambakan orde yang mampu menyejahterakan rakyatnya secara utuh. Akan tetapi, harapan tersebut tinggal kenangan karena kesejahteraan masih dimiliki oleh kalangan tertentu dan kemiskinan diderita oleh mayoritas warga dan distribusi kesejahteraan ekonomi tidak merata. Dengan demikian, muncul memori yang mengidolakan masa yang berlalu yaitu Orde Baru dengan 'Bapak Pembangunannya' yakni Soeharto. Keberhasilan Soeharto memimpin negeri ini diungkapkan sebagian warga pada tataran riil dengan dalih harga sembako terjangkau, besarnya subsidi BBM menjadikan harga BBM terjangkau oleh rakyat, meskipun hutang negara menumpuk dan rakyat pula yang membayarnya dengan teknik pembayaran melalui angsuran dengan pengalokasian dana dari APBN.

Di sisi lain, pengentasan orang miskin oleh pemerintah semakin lambat. Padahal volume anggaran pemerintah dalam bentuk APBN meningkat lebih dari empat kali lipat selama delapan tahun terakhir, dari Rp 374 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 1.548 triliun tahun 2012. Data BPS, penduduk miskin di Indonesia per Februari 2004 sebanyak 36,1 juta jiwa atau 16,6 persen dari total penduduk. Per Maret 2012, jumlahnya turun menjadi 29,13 juta jiwa atau 11,96 persen dari total penduduk. Jumlah penduduk miskin yang terentaskan semakin sedikit. Tahun 2008 ke 2009 angka kemiskinan berkurang 2,5 juta jiwa, tahun 2009-2012 angkanya berkurang 1 s.d 1,5 juta jiwa per tahun. Selama tahun 1999 s.d 2004 angka kemiskinan turun 11,9 juta jiwa dari 48 juta jiwa menjadi 36,1 juta jiwa. Periode 2004 s.d 2009, penurunan angka kemiskinan melambat menjadi 3,6 juta jiwa. Pada periode 2009 s.d 2011 penurunannya menjadi 2,6 juta jiwa. Perlambatan disebabkan antara lain tidak adanya keberpihakan pembangunan ke desa dan sektor pertanian. Jumlah 71,3 persen rumah tangga miskin berada di pedesaan dan bekerja di bidang pertanian (*Kompas*, 17 September 2012, hlm.17). Data dinamika kemiskinan tersebut perlu berpijak dari pengalaman sejarah negara-negara yang menangani kemiskinan.

Mendalami sejarah, minimal terdapat ungkapan yang perlu dipahami yakni belajar sejarah (*learning about history*), belajar dari sejarah (*learning from history*), belajar dengan sejarah (*learning by history*), belajar peristiwa yang menyejarah (*learning historic event*), menciptakan sejarah (*creating history*), dan sebagainya. Terdapat

istilah yang memiliki perbedaan makna yang fundamental antara sejarah dan menyejarah. Menurut penulis, sejarah adalah peristiwa masa lalu yang dijadikan catatan hidup untuk kehidupan masa kini dan masa mendatang berdasarkan fakta. Sebagaimana sejarah tulisan tertua di Eropa yang ditemukan di sebuah belukar pohon zaitun di Yunani diyakini para peneliti sebagai contoh tulisan tertua di Benua Eropa dan hurufnya jelas terbaca. Para arkeolog meyakini, catatan tersebut berasal dari tahun 1400 SM yang berasal dari kebudayaan Myceanea yang berkembang pesat di Zaman Perunggu Yunani, ditemukan di dekat Desa Iklania, Yunani Barat, tak jauh dari Laut Ionia. Kepingan tulisan tersebut berukuran 2,5x4 cm dan berisi catatan tentang daftar kepemilikan properti atau catatan manufaktur. Tulisan tersebut dikenal dengan Linear B, sebuah bentuk kuno bahasa Yunani yang terdiri atas 87 tanda yang mewakili suku kata. Keberadaan catatan itu menunjukkan bahwa kemampuan membaca dan perdagangan pada periode Mycenaea ternyata lebih berkembang dari yang diduga sebelumnya (*Kompas*, 5 Juni 2011, hlm.12), sedangkan kata 'menyejarah' adalah peristiwa sejarah, akan tetapi kebenarannya masih menjadi perdebatan, misalnya keotentikan Supersemar bagi bangsa Indonesia. Hingga kini, sejarawan belum menentukan keberadaan Supersemar yang sah karena wujud Supersemar lebih dari satu. Menurut Jusuf Wanandi, pendiri *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) pada 14 Agustus 2012 di Jakarta pada acara bedah buku *Shades of Grey* -yang berisi Pemerintahan Indonesia periode 1965-1998- menyatakan mantan Presiden Soeharto dinilai mengabaikan separuh isi Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Supersemar berisi pengalihan kekuasaan dan menjaga keamanan serta ketertiban di bagian pertama. Itu dilakukan Soeharto dengan segera dan seksama. Ada bagian kedua isi Supersemar yang tidak dilakukan yaitu mengamankan, menjaga, dan melestarikan ajaran Bung Karno. Bagian kedua tidak dilaksanakan karena adanya kekhawatiran kekuasaan Soekarno akan langgeng karena kekuatan Bung Karno masih kuat. Tokoh PNI, Soepeni menyarankan Bung Karno agar ke Surabaya menyusun lagi kekuasaan dan merebutnya dari Soeharto, bahkan saat Bung Karno akan menghadapi Parlemen pasca-G-30S PKI, satuan militer yang setia kepada Bung Karno sudah bersiap diri di daerah pelabuhan dan pesisir Jakarta berupa satuan yang siap bergerak mendukung Bung Karno (*Kompas*, 15 Agustus 2012, hlm.8).

Sejarah merupakan bagian dari ilmu sosial-humaniora, keberadaannya perlu dikembangkan dari aspek metode dan validitas sumbernya. Hal itu dilakukan agar kualitas sejarah yang telah ditorehkan oleh generasi masa lalu semakin nampak pesannya untuk kehidupan kini dan mendatang. Masa lalu bukanlah kejadian yang berlalu begitu saja, akan tetapi kejadian yang memiliki arti jika didalami dengan kaca pandang ilmu sejarah. Di antara kehidupan tersebut sebagaimana yang dialami oleh setiap individu atau kelompok untuk dijadikan 'bekal' dalam kehidupan. Perkembangan penulisan sejarah (historiografi) sangat ditentukan oleh perkembangan pemikiran yang dinamis pada masyarakat. Penulisan sejarah merupakan bentuk kesadaran masyarakat terhadap masa lalu leluhurnya, mulai dari bentuk sejarah lisan hingga sejarah yang tertulis.

### **MEMOTRET SEJARAH**

Kategori kajian ilmu sejarah menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Pranoto, kategori ilmu sejarah terpilah atas sejarah sosial, sejarah politik, sejarah ekonomi, sejarah psikologi, sejarah demografi, sejarah budaya dan seni rakyat, sejarah agama, sejarah lisan, sejarah lokal, sejarah nasional, sejarah keluarga, sejarah etnis, sejarah perempuan, sejarah pendidikan, sejarah agraria, sejarah desa, sejarah kota, sejarah maritim, dan sejarah pemikiran (Pranoto, 2010). Kategori tersebut meluas sesuai dinamika sosial dan kebutuhan terhadap ilmu sejarah itu sendiri, sehingga muncul sejarah kepolisian dan kemiliteran, dan sejarah hukum. Naskah ini mendalami jenis sejarah pemikiran dalam rangka menumbuhkan rasa nasionalisme dan kepahlawanan yang berpijak pada peristiwa sejarah (peristiwa masa lalu).

Beberapa pertanyaan seputar keberadaan sejarah untuk pencerahan meliputi apa itu sejarah? dan nilai apa yang terkandung dalam sejarah? Kata 'sejarah' dari bahasa Yunani: *istoria*, bahasa Latin: *historia*, bahasa Perancis: *histoire*, bahasa Inggris: *history*, bahasa Belanda: *geschiedenis*, bahasa Jerman: *geschichte* yang secara umum diberi tafsiran penyelidikan (*inquiry*) dan catatan (*a record*) terhadap peristiwa masa lalu yang dilakukan manusia. Sejarawan dan peneliti sejarah menyelidiki terhadap bukti yang dikumpulkan atas kesaksiannya yang ditemukan sumber asli (*authenticity*), kesaksiannya terpercaya (*credible*), dan andal (*reability*). Dengan

demikian, sejarah dinyatakan sebagai sesuatu yang ilmiah (*scientific*). Nilai sejarah (*the value of history*) merupakan studi tentang kehidupan manusia yang berhubungan dengan kemajuan dan peradaban (Pranoto, 2010:2 dan 6).

Kata 'sejarah' berasal dari berbagai bahasa. Dari bahasa Arab berasal dari kata *syajara* bermakna terjadi atau dari kata *syajarah* bermakna pohon, dari kata *syajarah an-nasab* bermakna pohon silsilah. Dari bahasa Inggris *history*, dari bahasa Latin dan Yunani, kata sejarah simetris dengan kata *historia* dari *histor* atau *istor* bermakna orang pandai. Beberapa istilah yang berkaitan dengan kata sejarah adalah guru sejarah, pegawai sejarah, pencatat sejarah, pelaku sejarah dan saksi sejarah, dan peneliti dan penulis sejarah (Kuntowijoyo, 2001). Kata 'sejarah' dipahami masyarakat umum dengan makna kisah, cerita, atau tuturan yang mana aktifitas tersebut telah dilakukan oleh pelaku sejarah pada masa lalu. Pelaku sejarah bukan dominasi sosok hebat, besar, dan berpangkat semata, tetapi person yang berperan dalam menorehkan dan berkiprah dalam percaturan sejarah. Kata 'masa lalu' berkedudukan sebagai keterangan waktu yang menunjukkan aktifitas yang telah berlalu dan tidak memiliki batasan jangka waktu (sejak kapan). Semakin lama, semakin menggugah kenangan sejarah jika dibanding masa yang *barusan* berlalu. Masa lalu dalam menggalinya membutuhkan kepiawaian bagi penulis sejarah jika dibuat torehan sejarah sehingga terdokumentasikan karena referensi sejarah masa lalu membutuhkan kepedulian pendokumen sejarah.

Beberapa kata kunci yang perlu 'didaftarkan' berpijak dari konsep di atas pertama, peristiwa masa lalu, maksudnya peristiwa dapat dipotret berpijak pada data sejarah. Kedua, peristiwa tersebut dilakukan oleh manusia. Hal lain yang urgen untuk ditelaah kaitannya dengan kategori sejarah dalam naskah ini adalah jenis sejarah pemikiran. Guna sejarah adalah sebagai ilmu, sebagai cara mengetahui masa lampau, sebagai pernyataan pendapat, dan sebagai profesi. Konteks naskah ini, sejarah lebih sebagai penuangan pendapat penulis tentang penanganan konflik sosial dalam aspekantisipasi oleh penguasa dan masyarakat.

Mengulas sejarah bukan sesuatu yang nihil pesan untuk kehidupan. Sebagai ilmu, sejarah merekonstruksi peristiwa masa lampau dan mengedepankan aspek keaslian (otentisitas), keterpercayaan (kredibilitas), dan keterhandalan (reliabilitas)

(Kuntowijoyo, 2001:199). Menurut Kartodirdjo, setiap generasi menulis sejarahnya sendiri penuh dengan kesadaran, sehingga perlu meninjau sejarah dari sejarah, artinya jalan serta arah atau kecenderungan pemikiran dan penulisan tentang masa lampau kita, sehingga tampak pola perkembangan yang menentukan atau tidaknya langkah memajukan usaha merekonstruksi sejarah Indonesia. Sejarawan tidak bekerja dalam situasi vakum spasial atau mulai menulis sejarah sukar dilepaskan dari kondisi masyarakat kita (*standartsgebundenheit des Denkens*) (1982:10). Menurut Suroyo, mengkaji sejarah karena kebutuhan meninjau kembali penulisan sejarah Indonesia oleh para sejarawan kolonial yang pada umumnya menggunakan sudut pandang *eropacentris*, yakni melihat perkembangan sejarah dari luar bangsa Indonesia (*history from without*) yang menampilkan bangsa Barat sebagai pemeran utama yang aktif. Sedangkan bangsa Indonesia sebagai pemeran pembantu yang pasif dalam menentukan sejarah. Penulisan kembali sejarah Indonesia perlu menempatkan bangsa dan masyarakat Indonesia sebagai pusat perhatian utama untuk mengemukakan dinamika masyarakat dalam menghadapi penetrasi kolonial (2000:1-2).

Menurut Mulyana dan Darmiasti, penulisan sejarah pada awal kemerdekaan sebagai bukti kesadaran sejarah dalam memberikan reaksi terhadap penulisan sejarah Indonesia yang hanya dilihat dari aspek luar yaitu penjajah (*Neerlandosentrisme*). Dalam penulisan ini, seolah-olah bangsa Indonesia tidak memiliki akar sejarah, hanya berperan sebagai obyek dalam peristiwa sejarah, sejarah hanya dimiliki bangsa asing (penjajah). Atas dasar kondisi tersebut maka muncul keinginan penulisan sejarah yang dilihat dari kaca mata bangsa Indonesia (*indonesiasentris*). Hal ini melatarbelakangi dilaksanakannya Seminar Sejarah Nasional I di Yogyakarta pada tanggal 14 s.d 18 Desember 1957. Sejak saat itu penulisan sejarah yang bersifat *indonesiasentris* mengalami perkembangan (2009:v). Mencari akar kesadaran dekonstruktif dalam historiografi Indonesia pascakolonial, menurut Purwanto, ternyata tidak mampu memunculkan sikap kritis terhadap pola pikir historiografi lama karena ketidakmampuan memahami secara kritis perbedaan antara sejarah sebagai sebuah realitas objektif masa lalu dengan sejarah sebagai sebuah hasil proses intelektual kekinian. Di samping itu, sejarawan melupakan sebuah kenyataan penting bahwa sejarah sebagai realitas objektif yang terjadi pada masa lalu merupakan

tindakan apa saja yang bersifat sangat manusiawi, bukan sesuatu yang seharusnya dilakukan manusia secara normatif (2006:41).

Menurut Margana, munculnya pameo *think global act local* (berpikir global bertindak lokal) merupakan respon terhadap isu globalisasi yang masuk ke hampir seluruh wacana kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Revolusi dalam teknologi komunikasi mengubah cara berpikir dan berperilaku manusia. Komunitas lokal mulai mengubah pemikiran dan perilaku mereka agar apa yang disebut arus globalisasi tidak menenggelamkan identitas dan eksistensi mereka. Pameo tersebut dianggap sebagai *strategy of survival* melawan mitos dasarnya arus globalisasi (2008:3). Analisis Fedyani (2009) globalisasi mengakibatkan keterbukaan informasi, realitas menunjukkan, hanya berlaku bagi kelompok kepentingan tertentu yang menguntungkan mereka dan mungkin merugikan pihak lain. Sehingga tawaran Fedyani dalam konteks informasi-komunikasi (budaya) menggunakan analisis konstruktivistik bahwa (i) kebebasan manusia tidak dengan sendirinya menghasilkan homogenisasi informasi, meski komunikasi antarmanusia semakin terbuka, (ii) kebebasan manusia melahirkan keanekaragaman budaya tidak lagi berbasis teritorial yang tegas (paradigma positivistik), dan (iii) keanekaragaman kebudayaan baru yang berbasis kepentingan, mudah berubah. Dengan demikian, agar arus globalisasi yang positif dapat diikuti dengan baik oleh warga negara, maka mewujudkan negeri yang *gemah ripah loh jinawi* sebagai tanggung jawab yang tidak ditunda. Perwujudan tersebut, pemerintah dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) mengagendakan perluasan infrastruktur dengan anggaran dana Rp 755 triliun bersumber dari pemerintah sebesar Rp 544 triliun dan dari *public private partnership* Rp 211 triliun. Dengan rincian untuk pembangunan jalan Rp 143 triliun, rel kereta api Rp 138 triliun, pelabuhan Rp 49 triliun, bandar udara Rp 14 triliun, energi Rp 288 triliun, sarana air Rp 8 triliun, telematika Rp 102 triliun, dan infrastruktur lainnya Rp 13 triliun. Total anggaran tersebut, 28 persen atau Rp 213 triliun dialokasikan di Jawa dan sisanya 72 persen atau Rp 542 triliun untuk luar Jawa (*Republika*, 28 Mei 2011, hlm.5).

## MANFAAT MENKAKJI SEJARAH DALAM BINGKAI KEPAHLAWANAN

Mengkaji setiap sesuatu, tentunya memiliki manfaat jika didalami dengan serius. Keseriusan dibuktikan dengan 'buah' yang dapat dipetik dalam konteks sejarah berupa:

Pertama, menumbuhkan nasionalisme dengan mengkaji peristiwa herois, sebagaimana perang yang dilakukan Pangeran Diponegoro. Potret perang ini diwujudkan dengan kepedulian anak bangsa terhadap pahlawannya serasa tergugah jika memahami jerih-payah Peter Brian Ramsay Carey, FRHISTS lahir di Yangon, Myanmar, 30 April 1948 doktor sejarah dari Oxford University, Inggris yang membukukan selama 30 tahun untuk memotret kiprah Pangeran Diponegoro dalam bukunya *The Power Prophecy: Prince Dipanegara and the End-of an Old Order in Java, 1785-1855* (KITLV Press 2007) yang diindonesiakan menjadi *Kuasa Ramalan Pangeran Dipanegara dan Akhir Tatanan Lama di Jawa 1785-1855* terbitan 2012 terdiri 892 halaman. Keberhasilan Carey menulis buku karena kepeduliannya terhadap Sang Pangeran. Selain buku tersebut, karya lain Carey adalah *Babad Dipanegara: An Account of the Outbreak of the Java War (1825-1830)*, tahun 1981. *Ekologi Kebudayaan Jawa dan Kitab Kidung Kebo*, tahun 1986, dan *The British in Java 1811-1816 A Javanese Account*, tahun 1992. Cara yang dilakukan meninggalkan 'mahkota' kampus untuk *nyuwito, tetirah, sabbatical leave, uzlah* dalam usaha mencari data untuk pengembangan keilmuan dengan penelitian walaupun meninggalkan 'singgasana' (menara gading/kampus). Di tengah usaha meneliti akan ditemukan keheningan hati yang mampu menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Titik awal yang menyebabkan Carey terpanggil mendokumentasikan Pangeran Diponegoro karena perang sengit antara kolonial Inggris dengan Keraton Ngayogyakarta. Penjajah Inggris (negara asal Carey) merampas kitab dan referensi dari Keraton Yogya untuk 'diamankan' di Inggris hingga kini. Dalam sejarah nasional, Perang Diponegoro dikenal Perang Jawa pada 1825-1830 yang dipicu oleh ketersinggungan Diponegoro ketika Belanda mengusur makam trah Keraton Yogyakarta untuk pembangunan jalan. Pengusuran itu direspon Diponegoro dan warga dengan semboyan *sadumuk bathuk, sanyari bumi ditohi pati* (sejari kepala, sejengkal tanah, dibela hingga mati). Kerugian akibat perang diderita VOC sekitar 20 juta gulden, sehingga era Gubernur Jenderal van den

Bosch, tahun 1830 diberlakukan tanam paksa (*cultuur stelsel*). Diponegoro dibuang Belanda ke Makassar hingga wafat di pengasingan pada 5 Januari 1855. Hingga kini makamnya masih membujur di Makassar. Diponegoro nama kecilnya Raden Mas Ontowiryo lahir pada 11 November 1785 merupakan putra Sulung Hamengkubuwono III, Raja Mataram Yogyakarta, dari seorang garwo selir (garwo ampeyan), R.A Mangkarawati dari Pacitan.

Kedua, meluruskan data sejarah. Sebagaimana data tempat lahirnya Bung Karno (Soekarno) pada era Orde Baru dinyatakan lahir di Blitar, Jawa Timur, diperkuat dengan makamnya di Blitar. Berdasarkan data sejarah, Soekarno lahir di Kampung Pandean IV Nomor 40 Surabaya. Rumah berpilar besar, jendelanya tinggi dan simetris di kanan-kiri, luasnya sekitar 6x14 m dengan ruang tamu yang menyatu dengan ruang keluarga, hanya disekat dengan lemari besar, terdapat dua kamar tidur. Di kamar pertama yang dekat dengan pintu masuk sebagai tempat lahirnya Bung Karno. Rumah tua masih asli (tidak pernah diubah) dibeli oleh Jamilah sejak tahun 1990 dan akan dibeli oleh Pemkab. Surabaya yang akan dibuat museum (*Jawa Pos*, 7 Juni 2011, hlm.16). Analisis Peter A. Rohi (2011:1) sejak tahun 2007 dilakukan revisi atas terjemahan buku *Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams*. Buku tersebut pernah diterjemahkan oleh pihak militer pada tahun 1966 yang diberi kata pengantar oleh Jenderal Soeharto (Panglima Komando Penertiban dan Pemulihan Keamanan, Pangkopkamtib), sebuah jabatan yang sangat berpengaruh saat itu. Hemat Peter, tentu mengherankan, betapa baiknya Orde Baru menerjemahkan buku di saat semua ajaran dan apa saja yang berbau Soekarno disingkirkan. Ternyata, ketika edisi revisi diterbitkan, terbukti terjemahannya merupakan bagian dari strategi penguatan kekuasaan Orba karena banyaknya pelintiran dan pembelokan atas fakta pada diri Bung Karo dengan sengaja. Pertama, kisah detik-detik proklamasi, ketika Bung Karno sedang menunggu Bung Hatta, tertulis (plintiran): *aku sebenarnya tidak membutuhkan Hatta*. Padahal, dalam buku sebelum diterjemahkan tertulis: *aku menunggu Hatta, Indonesia membutuhkan Hatta*. Kedua, buku terjemahan menyatakan kota lahirnya Bung Karno di Blitar, padahal di Surabaya. Sebagaimana Bob Hering, penulis Belanda yang mempelajari arsip tentang Bung Karno di Leiden, Belanda dan Arsip Nasional, Jakarta menjelaskan bahwa Bung Karno lahir pada Kamis Pon (Wuku Wayang), 6 Juni 1901 di Surabaya.

Ketiga, mengenang kiprah pejuang bangsa, sebagaimana dilakukan oleh Syafruddin Prawiranegara sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) sejak 22 Desember 1948 sampai mandat PDRI dikembalikan kepada Bung Hatta pada tanggal 13 Juli 1949. Begitu pula tempat yang dijadikan catatan sejarah perjuangan bangsa di Kota Pati, Jawa Tengah dengan Hotel Pati-nya yang dijadikan tempat menginap para Tentara RI masa agresi Belanda II tahun 1947. Hotel tersebut kita bandingkan dengan Kota Normandia di Perancis yang diinvasi oleh tentara Sekutu (AS, Inggris, dan Kanada) tahun 1944. Keduanya berbeda mendasar kaitannya dengan dokumen sejarah kota. Pada tahun 1926 Mr Tan Shi Ging (Mr Tan) mendirikan Hotel Pati sebagai hotel pertama di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Tempat penginapan tersebut semula untuk membantu para rekan dagangnya dari berbagai negeri ketika berbisnis di Indonesia. Hotel tersebut berada di jalan Herman Willem Daendels (sekarang jalan Sudirman, Pati) sebagai saksi sejarah yakni dijadikan tempat bertahan untuk perjuangan kaum muda pada agresi militer Belanda pascakemerdekaan tahun 1947. Semula hotel tersebut terdiri lima kamar yang berukuran 5x6 meter. Pada masa itu, kalangan pelajar mengambil bagian bersama Tentara Rakyat Indonesia (TRI) menahan laju serangan Belanda dari arah barat (Semarang). Puncaknya TRI Batalyon 426 Munawar meledakkan jembatan Tanggulangin yang berada di perbatasan antara Kota Kudus dengan Kota Demak. Saat itu, TRI Brigade 17 angkatan '45 meminjam Hotel Pati sebagai markas komando karena kota Pati sangat strategis, berada di tengah pelabuhan Juwana dan Semarang (pelabuhan antarpulau di Pantai Utara Jawa masa itu). Agresi Belanda dapat ditahan dan tidak memasuki Kota Pati. Pusaran ketegangan antara Belanda dengan TRI mereda dengan digelarnya Perjanjian Linggarjati antara RI dengan Belanda. Setelah kondisi kondusif, para pelajar yang tergabung bersama TRI melanjutkan sekolah di sekolah masing-masing. Sebelum lulus dari sekolah masing-masing, para pelajar mengabadikan peristiwa menginap di Hotel Pati pada masa agresi Belanda dengan mendirikan monumen di depan hotel yang berbentuk piramida setinggi 75 cm berada pada lahan seluas 100 m di pojok timur pelataran Hotel Pati hingga kini. Monumen tersebut berlatar patung dua pejuang menentang senapan dan mengepalkan tangan dengan berteriak. Piramida pada monumen tersebut bertuliskan kata 'Teroeskan' sebagai pesan kepada generasi masa kini untuk berjuang

dan mengisi perjuangan dengan menanamkan nilai nasionalisme dan patriotisme. Monumen tersebut pernah dipugar semasa AKBP (purn) R Soedartono ketika menjabat Ketua TP Eks 17 dan ketua Dewan Harian Cabang Angkatan '45 Kota Pati. Sepeninggal R Soedartono pada tanggal 16 November 2008, kepengurusan angkatan '45 mengalami stagnasi dan kegiatan peringatan di Monumen Tentara Pelajar juga berhenti. Kondisi kini, monumen kurang terawat dan hanya berada di bagian pinggir hotel sehingga dijadikan seonggok kenangan sejarah karena dikerubuti oleh parkir sepeda motor bagi perenang yang akan memanfaatkan kolam renang hotel (*Suara Muria, Suara Merdeka*, 8 Juni 2011).

Berbeda dengan dokumentasi terjadinya invasi ke Normandia, Jerman oleh tentara sekutu (AS, Inggris, dan Kanada) yang terjadi pada tanggal 6 Juni 1944 dengan TRI di Kota Pati di atas. Operasi dengan nama sandi Operasi Overlord yang dipimpin Jenderal Dwight D Eisenhower dari AS. Invasi selama dua bulan semasa Perang Dunia II itu bertujuan membebaskan Perancis yang diduduki Nazi Jerman. Armada yang digunakan menginvasi berupa ribuan kapal laut, ribuan pesawat tempur, dan 3 juta tentara yang menyeberangi Selat Inggris menuju ke Perancis menginvasi ke Normandia. Terdapat 6 titik pendaratan yang dituju dengan sandi Utah, Pointe du Hoc, Omaha, Gold, Juno, dan Sword. Pada hari Kamis 5 Juni 1944 pada Pukul 04.15, Jenderal Dwight D Eisenhower sebagai panglima perang gabungan sekutu memutuskan untuk menyerang pada tanggal 6 Juni 1944. Tahapan penyerangannya, pada Pukul 02.00 terdapat 822 pesawat dan *glider* dari pasukan lintas udara ke-82 dan 101 AS serta lintas udara ke-6 Inggris menerjunkan sekitar 11 ribu tentara di garis belakang pertahanan Jerman, AS di sebelah barat, dan pasukan Inggris di sebelah timur Perancis. Pada pukul 03.13, ratusan pesawat menjatuhkan 13 ribu bom dari pertahanan Jerman. Pukul 05.50 ratusan kapal perang sekutu yang berada di lepas pantai Normandia mulai menghujani pantai dengan tembakan meriam. Pada pukul 06.30, gelombang pertama pasukan pendaratan sekutu sampai di pantai. Ketiga Negara sekutu (AS, Inggris, dan Kanada) masing-masing memiliki area untuk diduduki. Jika AS berada di Pantai Utah dengan jumlah tentara sebanyak 23.250 tentara dengan korban 300 tentara. Sedangkan Inggris menduduki Pantai Omaha dengan 34.250 tentara dari Devisi infanteri ke-1 dan 29, korban sebanyak 2.400

tentara. Adapun Kanada menduduki Pantai Juno dengan kekuatan 28.845 tentara dengan korban sebanyak 630 tentara.

Potret penyerangan militer tentara sekutu menggunakan pesawat angkut C-46 dan C-47 serta *glider* dengan menerjunkan ribuan pasukan payung (berparasut) dari Divisi Lintas Udara ke-82 dan 101 AS di Semenanjung Cherbourg. Karena cuaca buruk akibatnya pasukan mengalami kesulitan dalam mencari dan menandai zona pendaratan yang dituju, sehingga Jerman kebingungan. Adapun kota pertama yang diduduki sekutu adalah kota Ste-Mere-Eglise. Di sisi lain, Jerman memiliki tebing setinggi 25-30 meter sebagai lokasi strategis menyerang dengan menembakkan meriamnya pada kapal sekutu yang berada di lepas pantai Utah dan Omaha. Sekitar 500 range dari Batalyon ke-2 AS di bawah Komando James Earl Rudder yang bertugas menguasai tebing. Jerman membangun sistem pertahanan statis di sepanjang pesisir pantai barat Eropa yang dikerjakan oleh zeni AD Jerman dan Organisasi Todt dengan mengerahkan ribuan pekerja paksa dari berbagai kamp konsentrasi. Sistem pertahanan tersebut merupakan ide dari Marsekal Erwin Rommel, yang disebut Tembok Atlantik. Tembok terbuat dari baja setinggi 2 meter, tonggak tegak dan landai yang dipasang ranjau, hedgehogs yang terbuat dari potongan rel kereta api, kawat berduri dan ladang ranjau, bunker beton kecil yang dilengkapi senapan mesin dan senjata antitank, kawat berduri dan ladang ranjau, bunker beton kecil yang dilengkapi senapan mesin dan senjata antitank, dan bunker beton berukuran besar yang dilengkapi meriam berukuran 75 mm dan 88 mm. Akan tetapi, karena sistem pertahanan tidak memiliki perlindungan udara, darat, dan laut sehingga tidak efektif. Kota-kota Jerman yang didarati tentara sekutu antara lain Utah, Omaha, Gold, Juno, dan Sword. Jumlah perlengkapan perang meliputi (a) armada sebanyak 6.939 kapal dan kapal pendarat terdiri 1.213 kapal tempur, 4.126 kapal pendarat, 736 kapal tambahan, dan 864 kapal dagang, 50 ribu kendaraan darat, 11.590 pesawat terdiri 14.674 sortie, hilang 127 buah, 2.395 pesawat kargo, dan 867 pesawat layang (*glider*), (b) personil terdiri, AS 156 ribu tentara AD, 195.700 AL, dan 11 ribu penerjun payung dikomandani oleh Dwight D Eisenhower dan Omar Bradley, Inggris dikomandani Bernard Law Montgomery, Trafford Leigh-Mallory, Arthur Tedder, Miles Dempsey, dan Bertram Ramsay, Jerman dikomandani Erwin Rommel, Gerd von Rundstedt, dan Friedrich Dollmann. Adapun

korban di pihak AS 6.603 (tewas 1.465), Inggris 2.700, Kanada 1.074, dan Jerman 4 s.d 9 ribu (*Kompas*, 5 Juni 2011, hlm.10).

Kedua peristiwa sejarah yakni agresi Belanda II oleh TRI yang menginap di Hotel Pati, Jawa Tengah sebagai tempat istirahat dan menyelamatkan diri para gerilyawan masa agresi Belanda II tahun 1947 yang kini hotel tersebut hanya terdapat seonggok monumen yang tak terawat. Begitu pula minimnya data yang berkaitan dengan pasukan, senjata, strategi perang dan lainnya berkaitan dengan agresi tersebut. Akan tetapi, data sejarah kaitannya agresi militer tentara sekutu (AS, Inggris, dan Kanada) terhadap wilayah Normandia di Perancis, terdapat data yang utuh, mulai dari jam penyerangan, tempat, jumlah tentara, dan lainnya. Mengapa demikian? Dalam konteks sejarah kota, terdapat tempat bersejarah yang seharusnya diabadikan dan terdokumentasikan dengan rapi agar generasi masa kini mengetahui dan menghormati, imbasnya termotivasi untuk gigih 'berjuang' sesuai dengan eranya.

Keempat, data sejarah diharapkan dapat menegakkan hukum karena pelaku tindak kriminal pada masa silam, jika dijatuhi hukuman memerlukan data yang bersumber dari sejarah. Sebagaimana kebanggaan terhadap kepahlawanan sang sosok pada masa lalu, bisa berputar haluan menjadi sosok penjahat karena pergantian kepentingan rezim. Sebagaimana dialami Retko yang semula sebagai pahlawan bagi warga Serbia karena memimpin pasukan, tetapi akhirnya menjadi pesakitan karena dituduh sebagai penjahat perang oleh warga dunia. Tidak bedanya Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Cut Nyak Dien, Teuku Umar, dsb. yang dianggap pembangkang oleh Belanda, tetapi menjadi jawara dan pahlawan bagi bangsa Indonesia.

Cut Nyak Dien dilahirkan di Lambadang, Aceh Besar tahun 1850, perempuan dari keluarga ningrat ini berjuang melawan Belanda di hutan. Tahun 1862 menikah dengan Teuku Ibrahim Lamnga, anak dari Uleebalang Lamnga. Tahun 1873 ketika meletus perang Aceh, Cut membantu perang suaminya, Lamnga, meski suami tewas dalam pertempuran di Gle Tarum. Sepeninggal suaminya (Lamnga), Cut menikah dengan Teuku Umar tahun 1880. Teuku Umar gugur dalam pertempuran di Meulaboh pada Februari 1899, tahun 1905 Cut ditangkap di pedalaman Meulaboh dan dibawa ke Banda Aceh. Pada Desember 1905 Belanda mengasingkan Cut ke Sumedang setelah anak buahnya, Pang Lot, tidak tega melihat kondisi kesehatan Cut

Nyak Dien (bermata rabun) dan memutuskan memberitahukan lokasi persembunyiannya pada Belanda dengan syarat dirawat dan diperlakukan dengan baik. Oleh Belanda, Cut Nyak Dien diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat, harapannya tidak lagi menjadi penyemangat perjuangan rakyat Aceh. Di Sumedang Cut Nyak Dien mengajar al-Quran penduduk setempat. Pada November 1908 Cut meninggal dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang Selatan. Tahun 1959 makam Cut di pemakaman keluarga Siti Khodijah di Sumedang ditemukan setelah dilakukan pencarian yang diprakarsai Gubernur Aceh saat itu. Tahun 1964 pemerintah menganugerahi gelar pahlawan kemerdekaan berdasarkan SK Presiden RI Nomor 106/1964. Tahun 1987 makam Cut dipugar/diperbaiki dan diresmikan oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Ibrahim Hasan (*Kompas*, 18 September 2012, hlm.4). Kiprah pahlawan putri selain Cut adalah Raden Ajeng (RA) Kartini. Kiprah Kartini diabadikan dalam Museum RA Kartini di jalan Alun-alun Nomor 1, Jepara, Jawa Tengah. Museum dibangun pada 30 Maret 1975 dan diresmikan pada 21 April 1977 dengan luas bangunan tradisional Jawa sekitar 890 meter.

Memahami manfaat mengkaji sejarah tersebut, diharapkan tumbuh rasa menghargai pahlawan nasional. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Pasal 1 (4) pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada WNI atau seseorang yang berjuang melawan penjajah di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara RI. Jenis pahlawan meliputi pahlawan proklamator, pahlawan kemerdekaan nasional, pahlawan nasional, pahlawan revolusi, pahlawan perintis kemerdekaan, dan pahlawan ampera, meskipun ada yang menilai bahwa pahlawan ampera dan perintis kemerdekaan tidak termasuk pahlawan nasional. Menurut Asvi W Adam, Soekarno dan Hatta telah ditetapkan sebagai Pahlawan Proklamator pada 1986. Sejak dilakukan pengangkatan pahlawan nasional pada 1959, nomenklatur pahlawan berubah-ubah, terutama diundangkannya UU Nomor 20 Tahun 2009, seperti pahlawan kemerdekaan nasional dan pahlawan nasional, pahlawan revolusi (10 orang), pahlawan proklamator (Soekarno-Hatta), dan tokoh nasional (Mgr Albertus Soegijapranata) (*Kompas*, 25 Juli 2012, hlm.6).

Pasal 3 (a) gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan diberikan bagi pahlawan dengan tujuan menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintahan atau organisasi yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. (b) menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, dan kejuangan setiap orang untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara, (c) menumbuhkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.

### **KEPRIHATIANAN PADA ILMU SOSIAL**

Dinamika ilmu sosial ditantang oleh publik agar mampu mengikuti kebutuhan keilmuan. Dalam konteks ini, keprihatinan disampaikan oleh Prof. Sunyoto Usman, guru besar UGM, Yogyakarta bahwa saat ini perguruan tinggi di Indonesia hanya menjadi konsumen dari ilmu dan metodologi yang dikembangkan Barat. Ilmu sosial yang diajarkan di Perguruan Tinggi (PT) sekarang sifatnya instan karena tidak berpijak dari kondisi riil Indonesia. Minimnya pengembangan ilmu berbasis keindonesiaan berakibat mengalami stagnasi ilmu sosial. Tidak semua ilmu dan metodologi Barat bisa digunakan untuk melihat kondisi Indonesia. Misalnya, kandidat kepala daerah dalam teori Barat tidak memasukkan ikatan primordialisme, di Indonesia primordialisme sangat menentukan seorang menjadi kepala daerah. Sejarah pembentukan Indonesia sangat berbeda dari negara tempat ilmu sosial berkembang (*Kompas*, 22/1/2011, hlm.12).

Sebuah pernyataan yang mengingatkan kita perihal kondisi kritis yang diderita ilmu sosial di negeri ini, sebagaimana pernyataan Purwo Santoso, dosen FISIP UGM, Yogyakarta ketika pidato pengukuhan sebagai guru besar pada Selasa, 19 April 2011 bahwa ilmu sosial di Indonesia mengalami kemandekan (stagnasi) bahkan ada yang menyebut sedang kritis. Hal ini dengan gejala antara lain kontribusi para ilmuwan sosial dalam pengembangan ilmu baik di tataran teoretis maupun metodologi belum bisa dibanggakan. Ilmuwan kita masih terkesan terombang-ambing menentukan aliran atau mazhab yang ditawarkan para teoretikus asing. Selain itu, ketika berdebat tentang politik dan pemerintahan di Indonesia, rujukannya adalah indonesianis (orang yang mendalami Indonesia) berasal dari bangsa non-Indonesia. Dalam cara pandang yang populer, teori sosial

diperlukan sebagai kebenaran dan fakta universal. Penerapannya ke dalam dunia nyata dipahami sebagai aktivitas keilmuan belaka. Padahal penerapan teori ke dalam kehidupan masyarakat adalah suatu pertarungan nasib. Penerapan paket teori impor, apalagi yang belum dikaji/disesuaikan dengan kondisi negeri ini, sering memunculkan sejumlah persoalan baru. Namun, banyak ilmuwan yang menepis pemahaman seperti di atas dengan mengatakan bahwa ilmu seharusnya tidak dibatasi oleh nasionalisme. Terhadap tepisan itu, Purwo mengingatkan bahwa ilmu sosial di negeri ini adalah ilmu tentang kita. Teori-teori yang dibangun oleh orang asing tentang kebersamaan kita, merupakan ketidaksadaran kita terhadap arti penting masa depan kita. Indonesia telah lama dijadikan lokasi penelitian para ilmuwan sosial mancanegara. Dari hasil penelitian mereka, telah dilahirkan berbagai teori besar. Ada teori politik aliran yang ditawarkan Herbert Feith dan Lance Castle, ada teori tentang kekuasaan masyarakat Jawa yang ditawarkan Benedict Anderson, dsb. Purwo mengatakan, universitas di Indonesia sepertinya masih menghadapi masalah. Boleh jadi komunitas ilmuwan di negeri ini mengalami sindrom kesulitan belajar dalam kebersamaan (*collective learning difficulty*) kalau bukan ketidakmampuan belajar dalam kebersamaan (*collective learning disability*). Purwo menawarkan pengembangan ilmu sosial yang transformatif yakni penegasan bahwa muara dari aktualisasi kegiatan ilmu, baik pendidikan maupun penelitian adalah pengabdian kepada masyarakat sebagai tambahan yang harus dipilih, bukan beban dan sebagai basis pijakan ilmuwan (*Kompas*, 20 April 2011, hlm.12).

Kaitannya dengan pengembangan penulisan sejarah -sebagai bagian dari ilmu sosial- penulis Barat, Poze, meneliti jati diri Tan Malaka dengan utuh, tetapi kita bangsa Indonesia hanya terbuai dengan karya bangsa Barat tersebut karena terbawa aroma politik, terutama era Orde Baru bahwa Tan Malaka berhaluan kiri sehingga kita nafikan. Menurut Direktur Kerja Sama dan Kelembagaan Ditjen Pendidikan Tinggi, Kemdiknas, Achmad Fauzi, Indonesia surga buat peneliti di bidang vulkanologi, kelautan hingga budaya (Hal ini disampaikan pada workshop 'Internasionalisasi Pendidikan Tinggi: Tantangan dan Peluang Kerja Sama Indonesia-Belanda' di Nusa Dua Bali tanggal 7 Juni 2011 (*Kompas*, 8 Juni 2011, hlm.12). Wakil Presiden Boediono saat membuka Konferensi Nasional Sejarah IX di Jakarta pada 5 Juli 2012 menyatakan, tanpa pemahaman sejarah yang

matang, Indonesia akan terjebak pada kesalahan yang sama. Pemahaman sejarah yang komprehensif membantu Indonesia menghadapi tantangan. Langkah ke depan harus diarahkan dengan pedoman dan perspektif yang benar yang diperoleh dengan belajar sejarah (*Kompas*, 6 Juli 2012, hlm.12). Sejak reformasi bergulir, kesadaran terhadap sejarah dan budaya yang melandasi keberadaan bangsa ini semakin meluntur, terutama di kalangan remaja dan anak muda pada umumnya. Hal ini memunculkan keprihatinan, menurut Taufik Abdullah -disampaikan pada dialog kebudayaan di Pontianak, 12-13 Desember 2011- kekinian kita sebagai bangsa tidak berdiri di ruang kosong, ia hadir dan dibangun melalui proses berdarah. Pada lapis bawah, rantai sejarah yang panjang mengikatnya sebagai negara-bangsa. Tanpa landasan historis, kekinian kita hampa (*Kompas*, 13 Desember 2011). Sepatutnya, proses pembelajaran sejarah sebagai bagian ilmu sosial yang memotret kiprah leluhur dioptimalkan agar hasil pembelajaran tergapai dengan baik yakni terwujudnya nasionalisme.

## **KONSEP PEMBELAJARAN SEJARAH**

Metode pembelajaran yang mengaktifkan diri antara pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran sebagai modal dasar menuju keberhasilan sesuai tugas kerja masing-masing. Dengan keaktifan, segala sesuatu dapat digapai dengan mudah. Keaktifan itu berlaku untuk pendidik, peserta didik, dan lingkungan pendidikan. Inovatif dalam proses pendidikan sangat diharapkan untuk menggapai keberhasilan, dengan harapan diperoleh perkembangan baru menuju pembaruan dalam segala aspek. Kreatif tidak hanya monopoli pendidik, peserta didik pun diharapkan mampu mengembangkan kreativitas sesuai dengan daya dan kemampuan diri menuju perbaikan. Efektif dalam proses pembelajaran dibutuhkan penggunaan waktu secara optimal, dengan harapan tidak terpaku pada aktivitas rutin. Adapun menyenangkan atau rasa *enjoy* dalam proses pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap proses pembelajaran. Hal ini diharapkan proses pendidikan memunculkan inovasi baru. Pembelajaran yang menyenangkan ini dikenal *contextual teaching and learning (CTL)*; memfokuskan proses pembelajaran menyenangkan melalui kreativitasnya (*learning by doing*) mengedepankan aspek praktik sehingga menjadi kebiasaan. Ada juga yang mengistilahkan *quantum learning* dengan memberikan

kesempatan kepada peserta didik belajar dengan materi yang menyenangkan dan menggairahkan. Seperti metode *visiting area* yakni mengunjungi situs sejarah, dsb.

Metode pembelajaran hasil reka pikir Indratno (2005) meliputi pembelajaran aktif (*active learning*), pembelajaran berpusat pada anak (*Child-centered learning*), dan pembelajaran yang menyenangkan (*joyful learning*). Pembelajaran aktif; hal ini dapat diartikan bahwa proses pembelajaran membutuhkan keaktifan dari berbagai unsur antara lain peserta didik, pendidik, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Keaktifan itu disesuaikan dengan kapasitas masing-masing dalam hal peningkatan prestasi pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada anak; keberadaan peserta didik sangat dominan peran sertanya berupa kesiapan awal untuk mengkaji dan mendalami materi ajar atau disebut dengan berbasis kompetensi, yang mana keberadaan peserta didik mengembangkan potensi secara optimal yang diimbangi dengan keberadaan sarana dan prasarana pembelajaran untuk merealisasikan teori-konsep yang dikenal dengan praktik pembelajaran.

Metode pembelajaran sejarah menurut Hartono (1996) berupa pemahaman gambar, belajar dengan peta, permainan drama dan simulasi, tugas menulis, studi dokumen, kajian teks, dsb. Metode pembelajaran sejarah yang dominan di berbagai jenjang pendidikan adalah ceramah dan dialog/diskusi, tugas individual, diskusi, dan *visiting area*. Pertama, ceramah dan dialog; hal ini dijadikan media transformasi informasi dengan harapan materi yang disajikan dapat dipahami, sedangkan dialog merupakan media umpan balik hasil materi yang diceramahkan. Kendala metode ceramah jika peserta didik tak mampu 'bersuara' karena berbagai hal, sehingga dalam proses pembelajaran tidak dialogis. Selain berceramah, metode yang tertradisi adalah tugas individual. Kedua, tugas individual; lazimnya berupa karya ilmiah, klipng media (nonbuku) meliputi koran, jurnal, buletin, dsb. yang dilaksanakan secara individu dengan diberi kemudahan berupa keleluasaan mencari sumber acuan (*reference*) dari berbagai topik kesejarahan. Ketiga, diskusi dilakukan dengan syarat suasana kelas kondusif dan peserta didik mampu menuangkan idenya untuk didiskusikan. Persoalannya ketika peserta didik 'tidak bersuara' maka pendidik harus sigap menumbuhkan suasana diskusi. Keempat, *visiting area* yakni mengunjungi dan memerhatikan realitas

situs sejarah sebagai cara kroscek terhadap teori atau aspek normatif kesejarahan.

Pembelajaran yang menyenangkan; kondisi ini sangat dominan ditentukan oleh pendidik terhadap peserta didik dengan metode, kiat, dan strategi khas dari pendidik. Di antara faktor “menyenangkan” dalam hal ini adalah adanya inovasi baru yang menyesuaikan dengan kondisi riil beserta prasarana yang ada. Diawali respon peserta didik yang jenuh menerima mata ajar sejarah karena bersifat pengulangan (mulai jenjang wajib belajar hingga perguruan tinggi), metode pembelajaran yang usang, dan pengajar yang tidak profesional merupakan parasit pendidikan, sehingga perlu evaluasi dan inovasi terutama pembelajaran sejarah. Hal ini dengan prinsip SWOT: kemampuan (*strength*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*opportunity*), hambatan (*threat*), solusi (*solution*), dan evaluasi oleh *stakeholders* pendidikan. Konsekuensinya perlu pemberdayaan komite sekolah/madrasah. Peserta didik ketika proses pembelajaran di kelas, lab, lapangan, bengkel kerja, di luar kelas dapat memahami secara utuh teks maupun makna di balik teks sejarah jika ditopang dengan materi yang aktual. Bagi guru, konselor atau pendamping; ketika mengajar dapat direspon dengan positif oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Untuk mata ajar; ketika guru menyampaikan materi ajar, peserta didik dapat piawai memahami pesan sejarah. Hasil belajarnya tercapai kaitannya dengan metode pembelajaran, dan lingkungan; hubungan antara lingkungan (sekolah/masyarakat) terwujud kesuksesan belajar. Hal tersebut berpijak adanya masalah dalam pembelajaran, untuk menelaah sisi lemah metode pembelajaran, identifikasi masalah, dan analisis masalah perlu dikedepankan. Untuk mendapatkan jawabannya, perlunya diteliti yang diawali dengan menggali problem pembelajaran dengan cara mendapatkan umpan balik (*feed back*) secara terbuka dari peserta didik, apa kendala dan bentuk keterbatasan metode dan materi pembelajaran supaya kejenuhan dapat dicari solusinya. Hal tersebut tercipta jika menggunakan metode pembelajaran yang dinamis dan saling memahami untuk memperbaiki diri masing-masing.

Proses pembelajaran sejarah di kelas yang menjenuhkan karena metode yang layu akibat pendidik yang asal comot, tak jelas *basic* keilmuannya, asal ada di depan peserta didik merupakan momok. Berdasarkan analisis dan temuan *United States Agency for*

*International Development* (USAID), kurang lebih sepertiga pelajaran yang diobservasi di kelas jenjang tingkat dasar hingga perguruan tinggi (PT) masih didominasi model ceramah. Menurut Djoko Santoso, Dirjen Dikti Diknas, hal itu berdampak proses belajar tidak berjalan kreatif, tidak efektif, dan tidak menyenangkan (*Republika*, 6 Juli 2010, hlm.6). Apalagi di jenjang wajib belajar, sejarah tidak di-UN-kan! Sehingga asal jalan, asal-asalan juga jalan nihil evaluasi. Sehingga perlu formulasi evaluasi yang ideal.

### **EVALUASI DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH**

Menurut Hartono (1996:104) evaluasi pembelajaran bertujuan mengukur prestasi hasil pembelajaran, berfungsi (i) formatif; membantu peserta didik mengembangkan ilmu yang sedang dipelajari, (ii) diagnostis formatif berfungsi sarana mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan materi (latihan) yang diberikan dan penyebab kegagalan, (iii) sumatif; memahami prestasi belajar yang sudah dilalui, (iii) diagnostik sumatif; mengetahui tingkat pengalaman belajar yang akan disiapkan bagi anak didik untuk belajar selanjutnya, sekaligus memahami di mana letak 'kekuatan' dan 'kelemahan' belajarnya. Adapun variasi penilaian (i) intuitif/perkiraan; mengamati keberhasilan pengajaran secara umum terhadap kegiatan pembelajaran, (ii) terstruktur; prosedur yang dirancang dan diadministrasikan dalam waktu yang ditentukan. Penilaian memiliki bentuk berkelanjutan dan terminal akhir mata ajar. Kriteria penilaian (i) validitas; sesuai dengan bentuk penilaian berhubungan dengan tujuan pembelajaran, (ii) kegunaan; mempertimbangkan masalah yang dihadapi dan sumber belajar yang diperoleh, (iii) reliabilitas; menggambarkan keakuratan terhadap keberhasilan peserta didik.

Selanjutnya menurut Hartono (1996:111) jenis penilaian yang tepat untuk pengajaran sejarah adalah (i) tes objektif (TO); memberi kesempatan menjawab (respon) terbatas, mengetahui secara tepat pengetahuan atau kecakapan yang sederhana (fakta tertentu, istilah sejarah, periode kesejarahan, pengenalan konsep, pengenalan hubungan antarperistiwa, dan pengenalan metode penelitian sejarah). Adapun bentuk TO adalah dengan jawaban dan isian singkat, pertanyaan dengan jawaban alternatif, ujian dalam bentuk menyesuaikan (*matching exercise*), ujian pilihan ganda, (ii) interpretif (penafsiran/pemahaman terhadap teks), (iii) esai (pertanyaan dalam

bentuk karangan atau *open ended question*) untuk memecahkan masalah atau pengembangan narasi pada topik singkat atau luas/panjang, (iv) memberi nilai angka pada tes karangan dengan cara, pertama, peringkat (*grading*) dengan tahap jawaban kritis atau berpikir tinggi, kemampuan yang baik (peluang keluar dari permasalahan yang diperintahkan, sedikit memahami pertanyaan tetapi tidak mengikuti arahan sesuai kategori. Kedua, memberi nilai angka sesuai kecakapan/keterampilan, berdasarkan skema: kurang, sedang, cukup, dan baik. Evaluasi dilakukan agar pengajar sejarah memahami keberhasilan pembelajaran peserta didik juga kelayakan atau idealitas metode pembelajaran yang tepat.

## **MEMUDARNYA NILAI PANCASILA BAGI WARGA BANGSA**

Selain optimalisasi evaluasi pembelajaran sejarah, perlu pula mengokohkan fondasi anak bangsa dalam berbangsa dan bernegara yakni mengaplikasikan kehidupan sehari-hari berbekal dari Pancasila. Presiden Soekarno menyebut Pancasila sebagai pandangan dunia (*weltanschauung*) dan dasar falsafah (*philosophische grondslag*) bagi bangsa kita dalam mengatur perikehidupan berbangsa. Pancasila juga sebagai alat perjuangan yang membedakan negeri ini dengan negeri lain. Pancasila perlu dibumikan dengan perangkat operasional yang sesuai dengan arus zaman. Jangan sampai Pancasila didistorsi secara sempit oleh penguasa hanya untuk melanggengkan kekuasaan. Praduga selama ini (pasca-Orde Baru), keberadaan Pancasila dianggap 'angin lalu' oleh anak negeri. Indikatornya dengan dilupakannya pelaku sejarah yang manis atau yang pahit, sebagaimana generasi kita yang tidak lagi memahami apalagi mendalami dan mempraktikkan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Imbasnya, nasionalisme anak negeri nyaris tergadaikan!

Ideologi Pancasila dirumuskan dan dilahirkan oleh pendiri bangsa sebagai kompromi atau wadah pemersatu kebhinekaan rakyat. Namun, dalam perjalanan sejarah dihadapkan dengan batu sandungan yang datangnya mulai dari penjajah hingga pemahaman sempit dari warga bangsa sendiri karena kepentingan diri dan kelompok untuk rentang sesaat. Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai jargon, dogma, dan doktrin dengan keangkuhan kekuasaannya. Seperti pola penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) diperkokoh dengan lembaga yang menaunginya, yakni Badan

Penyelenggara P4 (BP4) dijadikan wahana indoktrinasi. Di sisi lain, rezim Orba menuding pihak oposisi rezim dengan julukan subversif dan diasingkan. Keangkuhan tersebut berdampak BP4 ditutup oleh penguasa rezim era Reformasi karena lembaga dianggap singa ompong dan warga alergi dengan 'nama' Pancasila. Dengan sikap otoriter tersebut, Pancasila menjadi momok anak bangsa. Lantas, bagaimana seharusnya sekarang?

Kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini mengalami dinamika yang muncul silih berganti, antara suka-duka, maju-mundur, dst. Hal itu merupakan realitas kehidupan yang tak dapat dipungkiri. Kegundahan itu diduga akibat empat pilar bernegara meliputi pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dan Bhinneka Tunggal Ika mengalami degradasi (penurunan) pemahaman dan jauh dari aplikasi ideal oleh warga negara. Kondisi demikian ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyosialisasikan pada publik empat pilar tersebut dalam masa reses tahun 2011 dengan dana dari APBN sebesar Rp 21,2 juta untuk setiap masa reses, di luar anggaran penyerapan aspirasi Rp 7 juta per hari (dengan jatah maksimal sembilan hari dan tambahan anggaran untuk sosialisasi) (*Jawa Pos*, 27 April 2011, hlm.2). Anggota MPR periode 2009-2014 terdiri atas 560 anggota DPR RI dan 132 anggota DPD RI.

Hal ini menggambarkan bahwa pemahaman yang masih terbatas terhadap empat pilar bernegara perlu didatarkan kepada warga negara agar tidak terjadi pemupusan rasa nasionalisme karena pandangan sempit atas pesan agama. Sebagaimana keengganan sejumlah siswa di dua lembaga pendidikan yakni SD-SMP Al Irsyad Al Islamiyah di Tawangmangu tidak menggelar upacara bendera tetapi hanya apel, sedangkan di SD Islam Sains dan Teknologi (SD-IST) Al-Albani di Kec. Matesih, Kab. Karanganyar, Jateng tak mau menghormati bendera merah-putih. Oleh pengelola sekolah bahwa tidak menginstruksikan kepada siswa untuk tidak hormat bendera karena hal itu diserahkan kepada sikap individu siswa. Diperkuat oleh Ketua Harian Yayasan Khusus Al Irsyad Al Islamiyah, Sutadi, bahwa hormat bendera berkaitan dengan keyakinan sebagai muslim, maksudnya menghormat bendera dianggap syirik kepada Allah SWT dan akan membatalkan sebagai muslim. Hal ini menjadi bahan kajian rapat Muspida Kab. Karanganyar yang dihadiri Bupati Karanganyar, Rina Iriani Sri Ratnaningsih, Kapolres, Edi Suroso, Dandim 0727

Eddy Basuki, Kakemenag, Juhdi Amin, Kepala Kesbanglinmas Ign Trianto, Camat Tawangmangu Yopi Eko Jati Wibowo, Camat Matesih, Titik Umarti, sejumlah kepala SKPD, dan Ketua MUI Karanganyar, Zaenuddin. Ketua MUI mengatakan bahwa menghormati bendera merah-putih sebatas sebagai lambang negara, tidak dapat dikategorikan menyekutukan Allah atau syirik, tergantung niatnya. Bupati memberi waktu hingga akhir bulan Juni harus sudah menaati peraturan (*Suara Merdeka*, 8 Juni 2011, hlm.K).

## SIMPULAN

Mengenang peristiwa bersejarah bukan berarti menafikan esensi tujuan perjuangan para pahlawan yakni terwujudnya kehidupan warga negara yang sejahtera dan mengurangi ketimpangan sosial, ekonomi, budaya, dan terwujudnya tatanan hidup yang mulia. Sebagaimana upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-67 Tahun 2012 di Istana Kepresidenan Jakarta menghabiskan dana sebesar Rp 7,830.134.700. Berdasarkan analisis Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi dengan rincian pengadaan souvenir istana Rp 1,7 miliar, sewa sistem tata suara (*sound system*) Rp 629 juta, sewa AC, CCTV, kamera *shooting* dan lainnya Rp 1,1 miliar, bongkar-pasang tenda, flooring, kursi dan meja Rp 829 juta, dekorasi rangkaian bunga dan pembongkarannya Rp 818 juta, pengadaan pakaian sipil lengkap pejabat teras, pejabat eselon III dan IV, pegawai dan petugas perbantuan di lingkungan Setpres Rp 778 juta, penyediaan makanan dan minuman Rp 440 juta, dan pengadaan makanan ringan Rp 180 juta (*Suara Merdeka*, 15 Agustus 2012, hlm.3). Anggaran tersebut bermakna positif di satu sisi yakni penghormatan dan penghargaan yang memperingati detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945 tahun 2012 di Jakarta yang diikuti perwakilan dari seluruh negeri. Sisi negatifnya adalah ketimpangan antara peserta upacara yang berasal dari unsur pejabat yang mempunyai pakaian layak dan mampu membelinya lagi masih diberi alokasi anggaran oleh negara.

Penanaman nilai kepahlawanan dalam pendidikan dengan memanfaatkan data sejarah, sebagaimana paparan di atas diharapkan bagi generasi terdidik untuk, pertama, tumbuh rasa nasionalisme dan kebangsaan. Kedua, meluruskan data sejarah karena peristiwa sejarah oleh penguasa dapat dijadikan senjata politik untuk mengamankan rezimnya atau membunuh rezim lain. Ketiga, menengang kiprah

pejuang yang kadangkala tertindih oleh hiruk-pikuk dinamika kehidupan. Keempat, data sejarah dapat dijadikan sebagai bukti otentik di hadapan mahkamah pengadilan. Dengan keempat manfaat data sejarah tersebut, perlu pula penulisan sejarah tidak terkesan hanya mengkaji peristiwa elit dan dalam skop luas (elitis), tetapi perlu menelaah kaum *alit* dan lingkup terbatas, sehingga terwujudnya jembatan penghubung antara realitas kecil dengan pembaca (*giving voice to the voiceless*). Alasan tersebut diharapkan tercipta kesadaran sejarah (*historical consciousness*) oleh generasi anak bangsa (Rosyid, 2012:7).

### DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Asvi Warman. 2012. *Soekarno Sudah Pahlawan Nasional*. *Kompas*, 25 Juli.
- Hidayat, Bambang. 2011. *Penggantian Penjaga*. *Kompas*, 12 Mei.
- Kartodirdjo, Sartono. 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*, Gramedia: Jakarta.
- Kasmadi, Hartono. 1996. *Model-model dalam Pengajaran Sejarah*. IKIP Semarang Press: Semarang.
- Kuntowijoyo. 2001. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang: Yogyakarta.
- Margana, Sri. 2008. *Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global dalam Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Buku Obor dan KITLV-Jakarta.
- Mulyana, Agus dan Darmiasti. 2009. *Historiografi di Indonesia dari Magis-Religius hingga Strukturalis*. Refika Aditama: Bandung.
- Purwanto, Bambang. 2006. *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!* Ombak: Yogyakarta.
- Peter A. Rohi. 2011. *Sejarah Bung Karno yang Dipelintir*. *Jawa Pos*, 6 Juni.
- Rosyid, Moh. 2012. *Perlawanan Samin*. Idea Press: Yogyakarta.
- Suroyo, A.M. Djuliaty. 2000. *Eksplorasi Kolonial Abad XIX Kerja Wajib di Keresidenan Kedu 1800-1890*. Yayasan Untuk Indonesia: Yogyakarta.
- Saifuddin, Achmad Fedyani. 2009. *Ketidakmerataan Informasi dari Sisi Kebudayaan*. *Jawa Pos*, 6 April.